



# BULETIN PEMBANGUNAN DAERAH

ISSN 2962-4045



VOLUME 2 NOMOR 2, JUNI 2023

---

BAPPEDA KOTA BOGOR



# KATA PENGANTAR

**S**egala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor bisa menyelesaikan penerbitan Buletin Pembangunan Daerah. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Buletin Pembangunan Daerah ini merupakan edisi ketiga yang diterbitkan sebagai sarana komunikasi dan publikasi informasi mengenai kegiatan pembangunan di Kota Bogor.

Akhirnya, kami mengharapkan semoga buletin ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

**Kepala  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Bogor**



**Rudy Mashudi, S.T., MP**





# DAFTAR ISI

- 1** **POLICY BRIEF : PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA BOGOR 2022-2025 MENUJU BRIDA**  
Dr. Eko Sakapurnama, MBA
  
- 7** **TUBERKULOSIS DAN KESEHATAN MENTAL**  
Riastuti Kusuma Wardani, MKM, Ph.D
  
- 14** **TINJAUAN AWAL UNTUK PERENCANAAN PENGEMBANGAN LOKASI GORONG-GORONG JALAN NYI RAJA PERMAS KOTA BOGOR**  
Arif Wicaksono, SP, M.Si
  
- 19** **PEMBANGUNAN TPS3R SEBAGAI METODE OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BOGOR**  
Anisa Fadhillah Widyani
  
- 24** **YUK.....KENALAN DENGAN RUBO..! MASKOTNYA KOTA BOGOR**  
Lise Listianti, Muhamad Najmi Fauzan Firdaus



# POLICY BRIEF

**PENGUATAN SISTEM  
INOVASI DAERAH  
KOTA BOGOR  
2022-2025 MENUJU BRIDA**

**DISUSUN OLEH  
Dr. Eko Sakapurnama, MBA**



## EXECUTIVE SUMMARY

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2021 telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Di dalam implementasinya, diatur pula pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) yang berada pada level pemerintah provinsi/kota atau kabupaten.

---

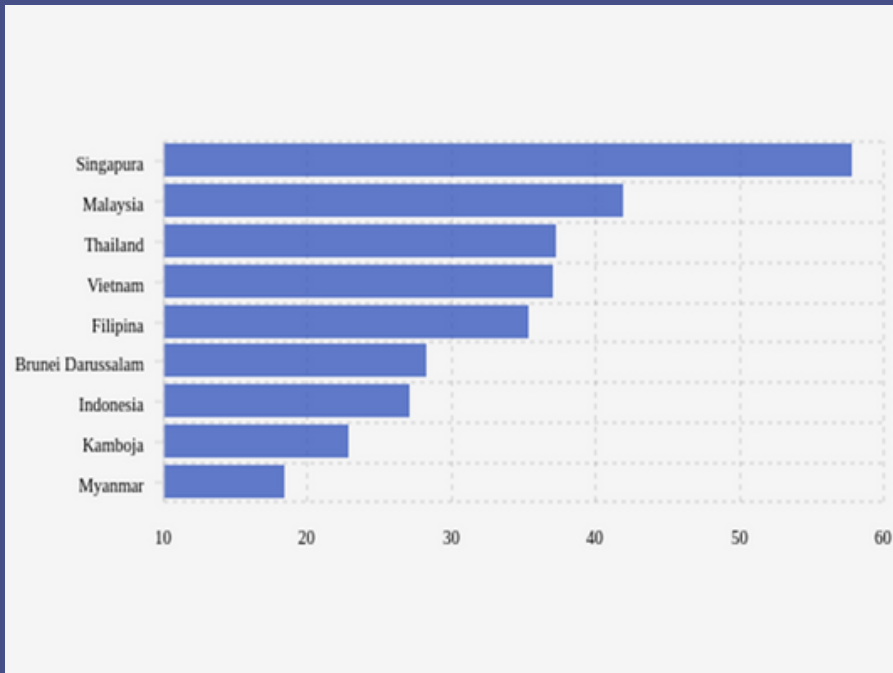
Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret kepada para stakeholder terkait *step by step* penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Bogor untuk periode 2022-2025 menuju BRIDA secara sinergis dan terintegrasi dengan elemen-elemen inovasi, serta diharapkan dapat memberikan masukan mengenai peta jalan yang berisikan rencana aksi sebagai sebuah strategi penguatan kebijakan litbangjirap riset dan inovasi Kota Bogor menuju BRIDA.

---

Roadmap (Peta jalan) Pengembangan SIDA Kota Bogor 2022-2025 ini dilalui dengan tahapan pemetaan awal, konsolidasi, inisiasi dan penetapan BRIDA Bogor. BRIDA Bogor, diharapkan menjadi *think tank* dalam merumuskan *policy brief* yang bertujuan untuk kebijakan pembangunan daerah Kota Bogor. Selain itu juga mampu menjadi katalis dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah Kota Bogor melalui hilirisasi riset dan inovasi.

# 1. LATAR BELAKANG

Di era kondisi dunia yang sangat *Volatile, Uncertain, Complex* dan *Ambigu (VUCA)* ini, tantangan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan inovasi nasional menjadi semakin kompleks dan dinamis.



**Gambar 1.1 Peringkat Indeks Inovasi ASEAN Tahun 2021**  
Sumber: <https://www.globalinnovationindex.org/> (2022)

Merujuk ke gambar 1.1, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam konteks pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Potret daya saing inovasi Indonesia di tahun 2021 tercermin dari indeks inovasi global (*Global Innovation Index*), dimana Indonesia bila dibandingkan dengan negara di Kawasan ASEAN masih berada di peringkat ke-7 setelah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam.

Inovasi tidak hanya aktivitas mengembangkan hasil riset dan kreatifitas, namun inovasi juga diharapkan dapat produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Inovasi hasil riset tidak hanya berhenti pada tahapan prototipe saja, namun juga diharapkan dapat menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan meningkatkan nilai komersial (*commercialization process value*). Fenomena tersebut, menjadi fokus bagi pembenahan yang harus dilakukan oleh pemerintah

saat ini, khususnya Badan litbang yang menjadi krusial untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional. Aktivitas inovasi daerah menjadi hal yang krusial bagi negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu alat dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah pada tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten adalah Menyusun peta jalan (Road Map) Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Hal ini menjadi penting sebagai salah satu strategi penguatan sistem inovasi dari sisi penguatan kebijakan inovasi daerah, kebijakan-kebijakan makro yang mendukung pelaksanaan penguatan sistem inovasi di daerah.

## 2. KONDISI SAAT INI

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2021 tentang tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan terkait ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Dalam implementasinya, diatur pula Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) di level pemerintah provinsi/kota ataupun kabupaten. Pada pasal 66 (ayat 1), BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Lembaga BRIDA akan menjadi organ vertikal Pemerintah Daerah bagi penguatan sistem inovasi di daerah namun sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

### 3. PRE-EXISTING POLICIES

Dalam kajian Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Bogor 2022-2025 menuju BRIDA, berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penulisan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pendefinisian inovasi dalam sektor publik tidak sama dengan inovasi yang terdapat pada sektor privat. Menurut OECD (2014), inovasi sektor publik merupakan ide-ide baru yang tumbuh untuk menciptakan nilai publik. Adapun karakteristik inovasi pada sektor publik menurut OECD observatory:

- Kebaruan; inovasi memperkenalkan pendekatan baru, sesuai dengan konteks atau lingkungan di mana inovasi akan diterapkan
- Implementasi; inovasi harus dilaksanakan, bukan hanya sekedar ide
- Dampak; inovasi bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih baik termasuk dengan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna atau karyawan.

Peraturan terkait dengan inovasi daerah dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 pada alinea 2 disebutkan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Guna mempercepat peningkatan kinerja penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Peningkatan pelayanan public
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan
- c. Peningkatan daya saing daerah.

PP Nomor 38 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa inovasi daerah dapat berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; yang merupakan pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- b. Inovasi Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang mana segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

#### 4. PILIHAN KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan penyusunan *roadmap* penguatan sistem inovasi Kota Bogor menuju BRIDA, meliputi:

- a. Menjadi *think tank* dalam merumuskan *policy brief* yang bertujuan untuk kebijakan pembangunan daerah Kota Bogor.
- b. Menjadi katalis dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah Kota Bogor melalui hilirisasi riset dan inovasi. Dengan banyaknya Lembaga Penelitian dan tingkat inovasi yang tinggi di Kota Bogor, BRIDA Kota Bogor akan memudahkan proses hilirisasi riset dan inovasi. Proses hilirisasi tersebut akan menjadi penggerak ekonomi untuk Kota Bogor.
- c. Melakukan tahapan pemetaan produk unggulan sebagai identitas dari inovasi Kota Bogor, yang mengedepankan Kota Bogor sebagai "*Knowledge Hub Innovation*" dan mendukung pengusulan Bogor sebagai "*Science City*"

Rekomendasi jangka pendek:

- a. Pemerintah Kota Bogor mendorong pengembangan kelembagaan BRIDA untuk mendukung implementasi sistem inovasi daerah;
- b. Membuat draft Raperda perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kota Bogor khususnya terkait perubahan Bappeda menjadi Bapperida
- c. Melakukan mapping asset terhadap Lembaga-lembaga riset serta SDM peneliti yang berdomisili di wilayah Kota Bogor.
- d. Mendorong sinergitas antar stakeholder seperti lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (*Litbangjirap*) untuk dapat memfasilitasi hilirisasi produk inovasi industri dengan mengklasifikasikan inovasi pelayanan publik (jasa) dan berbagai inovasi produk (pengembangan pada sektor ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain-lain);
- e. Menyusun strategi promosi dan komunikasi secara sistematis terhadap produk inovasi daerah untuk menciptakan demand di masyarakat;
- f. BRIDA Kota Bogor perlu melakukan scouting untuk mencari produk unggulan daerah Kota Bogor secara berkelanjutan;



g. Bappedda Kota Bogor melakukan penyusunan atas model ekosistem inovasi daerah;

h. Bappedda Kota Bogor turut mendorong koordinasi antar SKPD dalam upaya melakukan transformasi dari SILO (*ego-centric model*) ke KOLEKTIF (*ecosystem centric model*);

Rekomendasi Jangka Menengah perlu didorong untuk mengimplementasi pengembangan ekosistem inovasi daerah Kota Bogor perlu mengkolaborasikan beberapa aspek, seperti halnya :

a. BRIDA Kota Bogor berperan sebagai regulator, serta fasilitator dalam pengembangan riset dan inovasi daerah serta unit kerja pengembangan kompetensi ASN peneliti;

b. industri dan BUMN/BUMD dapat berperan sebagai penghasil, pendorong dan pengguna atas hasil inovasi;

c. media dan civil society dapat berperan sebagai influencer bagi masyarakat untuk menggunakan hasil inovasi;

d. serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian menjadi katalis dalam pengembangan inovasi daerah Kota Bogor.

Sedangkan rekomendasi jangka panjang meliputi Bappedarida/BRIDA Kota Bogor:

a. menyusun model ekosistem inovasi daerah

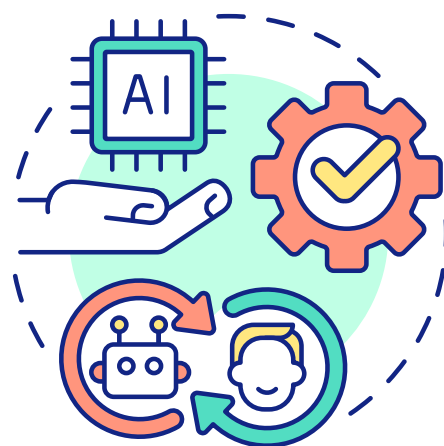
b. mendorong koordinasi antar SKPD dalam upaya melakukan transformasi dari SILO (*ego-centric model*) ke KOLEKTIF (*ecosystem centric model*)

## 5. PENUTUP

*Policy brief* ini sendiri disusun untuk memberikan input kebijakan terkait pengembangan BRIDA Kota Bogor yang terdiri atas berbagai sumber daya, kelembagaan dan jaringan. Untuk meningkatkan daya saing, maka diperlukan inovasi yang terus menerus dilakukan dan salah satu elemen kunci dari inovasi adalah kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah suatu lembaga/instansi/organisasi yang berperan dan terkait dalam pengembangan SIDA, seperti instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, serta perusahaan swasta/BUMN/BUMD, dan juga kelembagaan masyarakat yang masing-masing memiliki peran penting di dalam proses pengembangan dan hilirisasi inovasi daerah dan diharapkan dengan adanya sinergitas antar

lembaga, mampu menciptakan daya saing yang kuat untuk Kota Bogor.

BRIDA diharapkan mampu untuk menjadi *think tank* dalam merumuskan *policy brief* yang bertujuan untuk kebijakan pembangunan daerah Kota Bogor. Selain itu, dengan banyaknya lembaga penelitian dan tingkat inovasi yang tinggi di Kota Bogor, diharapkan dengan pembentukan BRIDA mampu untuk memudahkan proses hilirisasi riset dan inovasi sebagai motor meningkatnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kota Bogor melalui hilirisasi riset dan inovasi daerah.



# TUBERKULOSIS DAN KESEHATAN MENTAL



**Riastuti Kusuma Wardani, MKM, Ph.D**

**Dosen FIKES UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

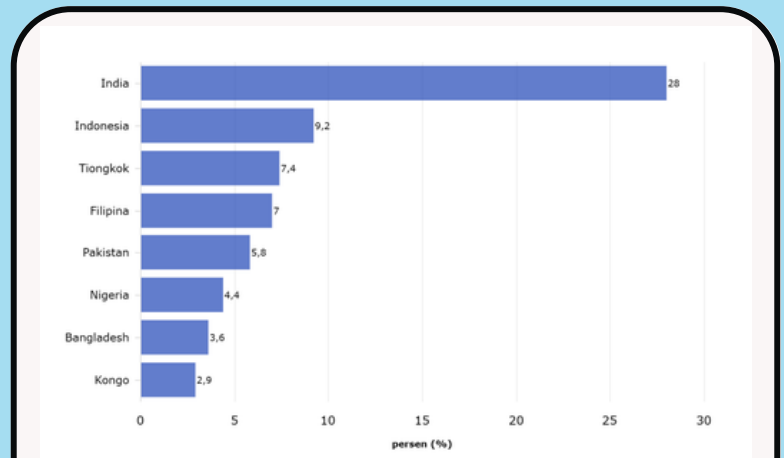


# APA KABAR TB ?

Tanggal 24 Maret adalah hari Tuberkulosis dunia. Tuberkulosis masih menjadi permasalahan global dan menjadi salahsatu target SDG's. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) menunjukkan, pada tahun 2020, ada beberapa wilayah yang memiliki kasus tuberkulosis (TBC) terbesar di dunia. Asia Tenggara merupakan wilayah dengan kasus TBC tertinggi yaitu 45% dari total kasus global, Afrika 23%, Pasifik Barat 18%, Mediterania Timur 8,1%, Amerika 2,9%, dan Eropa 2,2%.

WHO menyebut ada 30 negara dengan kasus TBC tertinggi yang menyumbang 87% dari total kasus global. Negara pertama ditempati oleh India dengan proporsi 28% dari total kasus global pada 2021 (Gambar 1). Kedua, Indonesia dengan sumbangan 9,2%. WHO menjelaskan, bahwa India bisa diestimasikan mencapai 2 juta kasus pada 2021 (Gambar 1). Sementara Indonesia 1 juta kasus pada periode yang sama.

Diperkirakan 10,6 juta orang jatuh sakit karena TBC di seluruh dunia pada 2021. Angka itu meningkat sebesar 4,5% dari 10,1 juta pada 2020. Demikian pula tingkat kejadian TBC (kasus baru per 100.000 penduduk per tahun) diperkirakan meningkat sebesar 3,6% antara tahun 2020 dan 2021. (Rizaty, 2021; World Health Organization (WHO), 2022)



**Gambar 1. Insiden TB di Dunia tahun 2021**

**Sumber: World Health Organization (WHO), 2022.**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi triple burden TBC, yakni insiden TBC, insiden TBC Resistant Obat (RO), dan TBC HIV.

Berdasarkan Global TB Report 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk insiden TBC dari lima negara, peringkat ke-7 untuk beban TBC RO dari 8 negara, dan peringkat ke-7 untuk beban TBC HIV dari 8 negara. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019) Pada tahun 2022, dilansir dari website Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, Jumlah kasus Tuberkulosis (TBC) di Indonesia sebesar 824 ribu dan kematian 93 ribu per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019; Widyawati, 2022) Berdasarkan laporan Yayasan KNCV atau Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Indonesia, kasus TBC di Indonesia naik sebesar 17% dari tahun 2020 ke tahun 2022 (Gambar 2). (KNCV Indonesia, 2022) Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi tertinggi kasus TBC, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah, dan Jawa Timur. (Katadata, 2022; Kemenkes RI, 2022) Kota bogor merupakan salahsatu kota yang berada diwilayah provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus TBC sebesar

Diagnosis dan pengobatan untuk penderita tuberkulosis (TBC) diberikan tidak dengan pembebanan biaya atau gratis. Namun demikian, penderita TBC menghadapi biaya transportasi, akomodasi, gizi, dan kehilangan penghasilan karena ketidakmampuan untuk bekerja. Hal tersebut menjadikan beban keuangan yang tinggi bagi penderita dan menyebabkan tidak dapat mengakses diagnosis, tidak memulai pengobatan, bahkan dapat berhenti pengobatan. Kondisi tersebut akan berisiko tinggi menularkan penyakit ke orang lain dan juga dapat berkembang menjadi TB Multidrug Resistant (MDR). (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019 kerugian ekonomi akibat penyakit TBC dan TB MDR adalah sekitar 136,7 milyar per tahun. Orang yang menderita TBC dan TB MDR, diperkirakan akan kehilangan pendapatan sebesar 38% dan 70%.

Di Negara-negara dengan jumlah penderita TBC yang besar, seperti di Ethiopia, Indonesia, dan Kazakhstan, penderita yang kehilangan pekerjaan sebesar 26% pada kasus TB dan 53% pada TB MDR. Beban terbesar dari kerugian TBC adalah kehilangan waktu produktif karena kecacatan dan kematian dini. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019) Penyakit TBC bukan hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental dan sosial penderita.

## Situasi TBC Indonesia



**Gambar 2. Gambaran TBC di Indonesia**

**Sumber: Yayasan KNCV Indonesia, 2022.**

Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan pada penderita TBC mengalami depresi, stress, dan kecemasan. (Azam et al., 2020; Endria & Yona, 2019; Kurniasih & Nurfajriani, 2021; Sulistyoningtyas & Khusnul Dwihestie, 2022) Gangguan mental emosional pada penderita TBC berdampak pada kualitas hidupnya yang rendah karena tingkat ketergantungan pada orang lain yang tinggi. (Alfauzan & Vita Lucia, 2021)

Stigma buruk terhadap penyakitnya berupa dipandang rendah oleh lingkungan sekitar ditemukan berpengaruh pada kondisi mental dan emosional penderita seperti perasaan malu, rendah diri, isolasi sosial sampai depresi. (Kurniyawan et al., 2022; Pribadi et al., 2019) Hal tersebut pun ditemukan berpengaruh terhadap kualitas hidup penderita Tuberculosis (TBC) yang rendah. (Endria & Yona, 2019). Selain itu lama pengobatan dan penyakit penyerta kronik juga ditemukan memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup domain mental penderita TB paru. (Sulistyoningtyas & Khusnul Dwihestie, 2022)

Tingkat stres dengan efikasi diri pada penderita tuberkulosis paru menunjukkan adanya korelasi

dengan hubungan yang kuat dan negatif. Artinya bahwa semakin parah tingkat stres, semakin tidak baik efikasi diri penderita tuberkulosis paru. (Kurniyawan et al., 2022) Stres pada penderita akan mempengaruhi proses penyembuhan penyakit karena penderita tidak mampu atau tidak termotivasi untuk mengelola penyakitnya, seperti lamanya pengobatan (Fuadiati et al., 2019) Dan kejadian putus obat pada penderita TBC berhubungan dengan rendahnya motivasi penderita, dan rendahnya motivasi dari keluarga. (Fuadiati et al., 2019). Permasalahan stigma masyarakat terhadap penderita TBC ini masih ditemukan menjadi hambatan dalam upaya penurunan jumlah penderita TBC di Indonesia khususnya. Persepsi dan keyakinan buruk terhadap penyakit dan penderita TBC menjadi faktor yang mempengaruhi stigma negatif terbentuk pada masyarakat. (Mulyana & Nursasi, 2019)

Stigma, menurut Goffman, didefinisikan sebagai atribut yang sangat mendiskreditkan. Ini menyebabkan seseorang diklasifikasikan berbeda dari yang lain karena status moral yang berbeda dan buruk. Stigmatisasi mengacu pada tanda yang terlihat sebagai hasil dari ekspresi fisik, seperti rasa jijik, diskriminasi, cacat karakter, atau kelompok marjinal (Goffman, 1974). Oleh karena itu, stigma didefinisikan sebagai perilaku yang mendiskreditkan individu. Stigma memengaruhi identitas sosial, yang memengaruhi kemampuan untuk mengelola dan menyembuhkan penyakit (Ku, 2019).

Stigma yang melekat pada penderita TB mengasumsikan negatif terkait perilaku asusila, keabadian, hedonisme, kemiskinan, kelompok marjinal, pekerja seks, dan orang dengan HIV/AIDS. Pengaruh stigma TB mengarah pada internalisasi stigma dan kepercayaan pada apa yang dipikirkan orang lain. Proses internalisasi menyebabkan stigmatisasi diri yang mengisolasi penderita tuberkulosis dari lingkungan sosial dan menghambat mereka dari penatalaksanaan TB. (Nuttall et al., 2022). Stereotip negatif menyebabkan penderita TB merasa tertekan dan tidak berharga. Internalisasi stigma yang melekat pada penderita TB bermula dari rasa takut penularan TB, keputusasaan, rasa bersalah, dan rendah diri. Persepsi TB sebagai hukuman menyebabkan penderita TB mengisolasi diri (Chinouya & Adeyanju, 2017).

Konsekuensi negatif dari stigma TB adalah fitnah, hinaan, diskriminasi, dan isolasi sosial. Stigma TB cenderung bertahan karena kurangnya pemahaman tentang penyakit TB. Secara global, stigma TB ada di antara orang-orang karena mereka takut tertular, bisa menyebabkan orang mengisolasi penderita TB dari fungsi sosialnya, bahkan menahan mereka dari rumah tangga, pengasuh, dan petugas kesehatan.

(Chakrabarty et al., 2018) Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu intervensi yang dapat mengurangi stigma TB dan karena stigma itu kompleks. Fokus intervensi pada individu, masyarakat, dan kebijakan sekaligus berguna untuk mengurangi stigma. Selain itu, intervensi untuk memitigasi diskriminasi dan stigma harus didasarkan pada populasi sasaran secara keseluruhan (Gronholm et al., 2017).

Intervensi stigma yang berfokus pada masyarakat dilakukan untuk mengubah sikap dan persepsi masyarakat dengan meningkatkan suatu pencarian pertolongan dan kepatuhan serta memberdayakan masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya (Mulyana & Nursasi, 2019). Sebuah strategi anti-stigma telah dikategorikan dalam bidang pendidikan

(menggantikan mitos dengan pengetahuan yang tepat), kontak atau interaksi dengan orang-orang untuk melawan prasangka, dan tindakan protes untuk menekan stigmatisasi (Gronholm et al., 2017). Kombinasi kontak dengan penderita TB dan edukasi dapat mengurangi stigmatisasi. Selain itu, intervensi psikoedukasi yang dilakukan oleh keluarga dapat membantu mengurangi stigmatisasi (Dempster et al., 2015).

Penanggulangan stigma TB ada hubungannya dengan meminimalisir persepsi negatif terhadap penderita TB atau membantu menghilangkan anggapan buruk terhadap penderita TB di masyarakat. Mengurangi stigma TB di masyarakat sangat penting bagi penderita TB agar mereka dapat memperoleh pengobatan, dan menyelesaikan program manajemen TB dengan mengubah stigma TB menjadi dukungan bagi penderita TB (Craig et al., 2017).

Oleh karena itu, Pemerintah daerah Kota Bogor dapat mengembangkan intervensi pada masyarakat yang berfokus untuk mengubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap TB dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan strategi dalam menyelenggarakan program kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016.

Intervensi kesehatan masyarakat berupa penyediaan informasi kepada keluarga melalui forum-forum yang ada di masyarakat seperti majlis taklim, paguyuban, karang taruna, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan organisasi masyarakat lainnya dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Bogor. Pelatihan kader kesehatan pada tingkat Puskesmas dan TOT (Training of Trainer) pada tingkat keluarga sebagai psikoedukator melalui kunjungan keluarga kelompok terstigma oleh Puskesmas

bersama kader kesehatan yang sudah terlatih. Kontak dengan kelompok yang terstigmatisasi dengan melibatkan anggota kelompok yang distigmatisasi untuk penyampaian informasi tentang Tuberculosis (TB) dan intervensi kesehatannya untuk mengembangkan empati, memanusiakan individu, dan meruntuhkan stereotip. Pada tingkat fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dapat meningkatkan mekanisme koping klien TB untuk mengatasi stigma. Terakhir adalah dukungan kebijakan atau regulasi berupa Peraturan Walikota yang didalamnya mengatur tentang pemberian pelayanan intervensi TB mencegah stigma negatif dan mempromosikan sikap serta persepsi positif pada TB.



# REFERENSI

- Alfauzan, & Vita Lucya. (2021). Gambaran Kualitas Hidup Pada Penderita Tuberkulosis Di Asia: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 7(3), 65–70. <https://doi.org/10.33023/jikep.v7i3.810>
- Azam, M., Fibriana, A. I., Indrawati, F., & Septiani, I. (2020). Prevalence and Determinant of Depression among Multi-Drug Resistance Tuberculosis: Study in Dr. Kariadi General Hospital. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 40(2), 88–96. <https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.106>
- Chakrabartty, A., Basu, P., Ali, K. M., Sarkar, A. K., & Ghosh, D. (2018). Tuberculosis related stigma and its effect on the delay for sputum examination under the Revised National Tuberculosis Control Program in India. *Indian Journal of Tuberculosis*, 65(2), 145–151. <https://doi.org/10.1016/j.ijtb.2017.08.032>
- Chinouya, M. J., & Adeyanju, O. (2017). A disease called stigma: the experience of stigma among African men with TB diagnosis in London. *Public Health*, 145, 45–50. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2016.12.017>
- Dempster, M., Howell, D., & McCorry, N. K. (2015). Illness perceptions and coping in physical health conditions: A meta-analysis. *Journal of Psychosomatic Research*, 79(6), 506–513. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2015.10.006>
- Endria, V., & Yona, S. (2019). Depresi Dan Stigma Tb Dengan Kualitas Hidup Pasien Tuberkulosis Paru. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.37294/jrkn.v3i1.151>
- Fuadiati, L. L., Dewi, E. I., & K, E. H. (2019). Hubungan Mekanisme Koping dengan Stres Pasien TB Paru di Rumah Sakit Paru Jember. *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 7(2), 71–79.
- Goffman, E. (1974). Stigma; Notes on the management of spoiled identity. In Jason Aronson, New York, N.Y.: Vol. (147 p.) \$. <https://doi.org/10.2307/2575995>
- Gronholm, P. C., Henderson, C., Deb, T., & Thornicroft, G. (2017). Interventions to reduce discrimination and stigma: the state of the art. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 52(3), 249–258. <https://doi.org/10.1007/s00127-017-1341-9>
- Katadata. (2022). Ini Provinsi dengan Kasus TBC Terbanyak pada 2021. *Databoks.Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/23/ini-provinsi-dengan-kasus-tbc-terbanyak-pada-2021#:~:text=Pada tahun 2021 kasus TBC,di Indonesia,%22 jelas Kemenkes.>
- Kemenkes RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2021. In *Pusdatin.Kemenkes.Go.Id*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). TBC Akibatkan Banyak Kerugian Ekonomi – Sehat Negeriku. *Sehat Negeriku Sehat Bangsa*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20190319/4629770/tbc-akibatkan-banyak-kerugian-ekonomi/>
- KNCV Indonesia. (2022). Laporan Kasus Tuberkulosis (TBC) Global Dan Indonesia 2022. <https://Yki4tbc.Org/Laporan-Kasus-Tbc-Global-Dan-Indonesia-2022/#:~:Text=Insidensi%20kasus%20TBC%20di%20Indonesia,Di%20antaranya%20yang%20menderita%20TBC., November, 1–1. https://yki4tbc.org/laporan-kasus-tbc-global-dan-indonesia-2022/>
- Ku, C.-C. (2019). Healthcare seeking behaviour as a link between tuberculosis and socioeconomic factors (Issue October). the University of Sheffield. <http://etheses.whiterose.ac.uk/25352/>
- Kurniasih, E., & Nurfajriani, V. J. (2021). Gambaran Tingkat Kecemasan Pasien Tb Paru Telaah Literatur. *Ilmu Ilmu Keperawatan*, 21, 78–91.

# REFERENSI

Kurniyawan, E. H., Noviani, W., Dewi, E. I., Susumaningrum, L. A., & Widayati, N. (2022). Hubungan Tingkat Stres dengan Efikasi Diri pada Pasien TBC Paru. *6*(2), 1–23.

Mulyana, R., & Nursasi, A. Y. (2019). The Intervention Strategies To Reduce Tuberculosis Stigma Based On Community: A Systematic Review. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, *5*(1). <https://doi.org/10.17509/jpki.v5i1.16371>

Nuttall, C., Fuady, A., Nuttall, H., Dixit, K., Mansyur, M., & Wingfield, T. (2022). Interventions pathways to reduce tuberculosis-related stigma: a literature review and conceptual framework. *Infectious Diseases of Poverty*, *11*(1). <https://doi.org/10.1186/s40249-022-01021-8>

Pribadi, T., Karyanto, K., & Yansuri, Y. (2019). Hubungan Gambaran Diri Dalam Berinteraksi Sosial Pada Penderita Tb Paru Di Wilayah Kerja Upt Puskesmas Negeri Agung Lampung-Indonesia.

Sulistyoningtyas, S., & Khusnul Dwihestie, L. (2022). Kualitas Hidup Domain Mental Pasien Tuberkulosis Paru. *Jurnal Ilmiah Permas: STIKES Kendal*, *12*(Januari), 75–82. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM%0AKU>

Widyawati. (2022). Tahun ini, Kemenkes Rencanakan Skrining TBC Besar-besaran. *Kementerian Kesehatan RI*. [kemkes.go.id](http://kemkes.go.id)

World Health Organization (WHO). (2022). Indonesia Masuk Jajaran Negara Penyumbang Kasus TBC Terbanyak di Dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/20/indonesia-masuk-jajaran-negara-penyumbang-kasus-tbc-terbanyak-di-dunia>

Sholihin, M. (2022). Ada 4.541 Kasus TBC di Kota Bogor pada 2021, Naik Hampir 2 Kali Lipat. *Detiknews*, *Maret*(25), 1–12. <https://news.detik.com/berita/d-6001388/ada-4541-kasus-tbc-di-kota-bogor-pada-2021-naik-hampir-2-kali-lipat>

*Holistik Jurnal Kesehatan*, *13*(2), 184–193. <https://doi.org/10.33024/hjk.v13i2.1439>

Rizaty, M. A. (2021). Tren Kasus Penyakit Tuberkulosis di Indonesia Terus Berkurang | *Databoks*. *Databoks*, 1–1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/tren-kasus-penyakit-tuberkulosis-di-indonesia-terus-berkurang>







# **TINJAUAN AWAL UNTUK PERENCANAAN PENGEMBANGAN LOKASI GORONG-GORONG JALAN NYI RAJA PERMAS KOTA BOGOR**

oleh  
**Arif Wicaksono, SP, M.Si**

## PENDAHULUAN

Walikota Bogor Dr Bima Arya Sugiarto bersama Kepala Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor pada tanggal 28 Agustus 2021 telah melakukan kunjungan lapangan di lokasi penemuan gorong-gorong Jalan Nyi Raja Permas yang diduga sebagai konstruksi peninggalan Jaman Belanda (Bappeda Kota Bogor, 2021). Penemuan lokasi ini berawal dari pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bogor melakukan langkah-langkah penanganan gorong-gorong Jalan Nyi Raja Permas diantaranya dengan membentuk tim teknis kajian.



Sebagai langkah awal penanganan gorong-gorong Nyi Raja Permas, Pemerintah Kota Bogor membentuk tim kajian yang dituangkan dalam SK Walikota Nomor 800.2/KEP.784-BAPPEDA/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Sejarah dan Peruntukkan Terowongan dan Saluran Air Peninggalan Zaman Belanda di Jalan Nyi Raja Permas dan Jalan MA Salmun Kota Bogor yang beranggotakan empat unsur yaitu pemerintah, tim ahli, akademisi, dan masyarakat.

Pertemuan perdana antara Tim Teknis Kajian dengan Walikota Bogor berlangsung pada tanggal 14 September 2021 bertempat di Paseban Sri Bima Balaikota Bogor.

Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, maka pada tanggal 14 Oktober 2021 dilaksanakan survai lapangan yang melibatkan tim teknis kajian dengan tim dari Balai Arkeologi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Titik awal survai adalah lokasi pembangunan Alun-alun Kota Bogor menyusuri Jalan Nyi Raja Permas dan berakhir di Jembatan MA Salmun.



Salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan dari Laporan Survei Saluran Air Lama Di Kawasan Stasiun Kereta Api Bogor Jawa Barat oleh Balai Arkeologi Jawa Barat (Sutrisna, Budiman, & Adra'i, 2021), "khusus saluran air yang telah ditemukan yang berada dalam lokasi emplasemen stasiun kereta api Bogor sebaiknya diamankan, dilestarikan dan dijadikan museum dengan memagari lokasi sekitar titik temuan. Lokasi sekitar temuan sebaiknya disertai dengan infografik atau deskripsi tentang saluran yang ditemukan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memberikan pengetahuan dan fungsi edukatif kepada masyarakat luas".

Berdasarkan rekomendasi dari Balai Arkeologi Jawa Barat ini, maka gorong-gorong Jalan Nyi Raja Permas memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Hal ini juga didukung oleh akses jalan menuju lokasi gorong-gorong Jalan Nyi Raja Permas, pada beberapa bagian telah dibangun jalur pedestrian dan juga terletak dekat dengan Alun-alun Kota Bogor. Sebelum menuju kepada implementasi rekomendasi untuk pengembangan lokasi gorong-gorong Nyi Raja Permas,

maka diperlukan tinjauan awal yang berisi tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan kawasan heritage. Selain itu tinjauan awal ini juga berusaha mengidentifikasi berbagai pedoman teknis yang bisa digunakan dalam melakukan perencanaan.

## TINJAUAN AWAL PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan kawasan heritage, Jones & Pappas (2023) mengemukakan konsep pendekatan berbasis identitas dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan heritage, sehingga identitas ini bisa menjadi daya tahan sebuah lokasi wisata terhadap kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana. Dalam pembangunan sebuah kawasan heritage, Foster (2020) mengemukakan strategi penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan gedung bersejarah yaitu dengan membatasi gangguan terhadap pohon, tanah, dan habitat, mempertahankan ruang terbuka hijau dan menggunakan material dan tata bangunan tradisional.

Beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan kawasan cagar budaya juga perlu dipedomani dalam mengembangkan lokasi gorong-gorong Nyi Raja Permas sebagai destinasi wisata. Diantaranya adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan, dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya. Selain itu, perlu dilakukan analisis kesesuaian lokasi gorong-gorong Nyi Raja Permas dengan arahan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

Tahap perencanaan lokasi gorong-gorong Nyi Raja Permas yang menghasilkan produk-produk seperti Studi Kelayakan, Master Plan, dan Detail Engineering Design (DED) perlu melibatkan pemangku kepentingan seperti Tim Ahli Cagar Budaya, budayawan, dan masyarakat. Aktivitas konsultasi publik dalam melakukan revitalisasi kawasan cagar budaya sebelumnya pernah dilakukan dalam pekerjaan Revitalisasi/Restorasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis di Kota Medan yang melibatkan diantaranya perangkat daerah, pengelola gedung dan masyarakat sekitar (Marikena et al., 2023).

Tinjauan awal tahap perencanaan pengembangan ini memuat hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai tahap awal menuju perencanaan suatu pengembangan kawasan gorong-gorong Nyi Raja Permas dengan mengacu hasil-hasil survai lapangan di lokasi. Namun demikian, penggunaan tinjauan awal ini sebagai landasan rekomendasi kebijakan masih perlu disesuaikan dengan data-data terbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Foster, G. (2020). Circular economy strategies for adaptive reuse of cultural heritage buildings to reduce environmental impacts. *Resources, Conservation and Recycling*, 152. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104507>.
- Jones, Z.M., & Pappas, T. (2023). Developing an identities-based approach to support more robust resilience and recovery in heritage planning and management. *Built Heritage*, 7(2). <https://doi.org/10.1186/s43238-023-00082-4>
- Marikena, Nita, & Setiawannie, Y. 2023. Konsultasi Publik Kegiatan Revitalisasi Gedung Cagar Budaya. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 2(1), 69-75.
- Sutrisna, D., Budiman, H.G., & Adra'i, A. 2021. Laporan Survei Saluran Air Lama Di Kawasan Stasiun Kereta Api Bogor Jawa Barat. Balai Arkeologi Jawa Barat.



# PEMBANGUNAN TPS 3R SEBAGAI METODE OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BOGOR

DISUSUN OLEH

ANISA FADHILLAH WIDYANI





Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor sebesar 2,07% pada tahun 2022 (Kota Bogor Dalam Angka, 2023) menyebabkan peningkatan jumlah aktivitas masyarakat yang menyebabkan peningkatan volume sampah di Kota Bogor. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, menyebabkan bahwa kebijakan strategi terkait program pengelolaan sampah yaitu untuk mencapai target penurunan timbulan sampah dan mencapai target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. Target-target setiap tahunnya tercantum pada Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bogor dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kota Bogor Tahun 2022 Periode 2 (Juli-Desember), tercatat jumlah timbulan sampah di Kota Bogor sebanyak 737 ton/hari. Dari total timbulan sampah yang dihasilkan, sebanyak 536,4 ton/hari masuk ke TPA Galuga. Inilah yang kemudian mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan terobosan dalam optimalisasi sistem pengelolaan sampah kota yaitu melalui pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) guna mengurangi jumlah timbulan sampah ke TPA dan melakukan edukasi

masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber. Pada sektor swasta pembatasan timbulan sampah dapat dilakukan dengan penggunaan bahan kemasan yang dapat didaur ulang, melakukan investasi dalam fasilitas pengolahan sampah modern, pengembangan produk ramah lingkungan serta melakukan kerja sama dengan pemerintah dan LSM (non-pemerintah) dalam program pengelolaan lingkungan. Keberhasilan pengelolaan sampah di TPS 3R tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah, serta masyarakat (mencakup sektor pendidikan) dan sektor swasta. Pada sektor pendidikan topik pengelolaan sampah dapat dimasukkan pada kurikulum di sekolah hingga SMA dan dibelajarkan secara monolitik maupun integratif

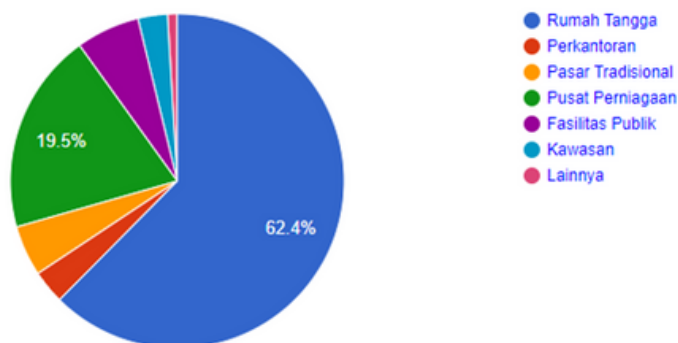
# PERMASALAHAN

Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien menjadi tantangan yang mendesak di Kota Bogor. Dimana kesadaran masyarakat dalam melakukan pembatasan, pemanfaatan kembali sampah dan pemilahan sampah merupakan bagian terpenting dalam alur proses pengelolaan sampah. Data SIPSN pada tahun 2019 s.d 2022 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah timbulan sampah di Kota Bogor(gambar 1)



## TUJUAN PEMBANGUNAN TPS 3R DI KOTA BOGOR

### Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah



Pembangunan TPS 3R berbasis pengelolaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditujukan agar menjadi metode optimalisasi dan pembelajaran bagi masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang bersumber dari Rumah Tangga. Melalui model Pengelolaan TPS 3R diharapkan mampu melakukan sampah dari berbagai sumber dengan konsep mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse) dan daur ulang (Recycle).

Pembangunan TPS 3R di Kota Bogor bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting yaitu :

1. Mengurangi Volume Sampah yang dibuang ke TPA Galuga

Dengan pembangunan TPS 3R yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Bogor, diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang. Pendekatan pengelolaan sampah dengan 3R akan mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi berlebihan, dan mendaur ulang sampah menjadi produk baru layak pakai.

Pada tahun 2022, sampah di Kota Bogor didominasi oleh 2 sektor yaitu sampah Rumah Tangga sebesar 62,4 % dan sampah dari sektor Pusat Perniagaan sebesar 19,5% (gambar 1). Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan pembangunan TPS 3R berbasis pengelolaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk meningkatkan dari kesadaran masyarakat pada level Rumah Tangga untuk melakukan proses pembatasan jumlah sampah, pemilahan hingga pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah Kota Bogor telah melibatkan masyarakat melalui terbentuknya KSM, dan kolaborasi dengan sektor swasta pembangunan TPS 3R. Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) merupakan pola pendekatan dari suatu pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan suatu masyarakat, termasuk untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh. (Dirjen Cipta Karya, 2021).



## 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masyarakat

Pengelolaan sampah dari sumber yang baik dengan TPS 3R dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan metode TPS 3R ini masyarakat akan lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar.

## 3. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber

Dengan sosialisasi dan edukasi dari KSM TPS 3R kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dari sumber yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum diangkut ke TPS 3R terdekat.

Pada tahun 2023 terdapat 30 TPS 3R yang sudah dibangun dan tersebar di seluruh kecamatan Kota Bogor (Tabel 1). Dengan kondisi hampir 80% pengelolaan sampah berbasis KSM.



Peta lokasi persebaran TPS 3R di Kota Bogor  
Sumber : DLH Kota Bogor, 2018

Tabel 1 Lokasi TPS 3R Kota Bogor

NO	NAMA TPS 3R	LOKASI	PENGELOLA
1	Ceremai	Kp. Legok Muncang RT 001 RW 015	KSM
2	Mutiara Bogor Raya	Mutiara Bogor Raya Blok F5 No. 17 RT 009 RW 008	KSM
3	Tunas	Jl. Rancamaya Agribisnis RT 01 RW 01	KSM
4	TPS 3R Asri Bubulak (GWK)	Perum. Griya Wanakarya Permai Blok I2 No. 1	KSM
5	Griya Melati	Perum. Griya Melati RW 13	KSM
6	Rusunawa Menteng	UPTD Rusunawa	KSM
7	Ciparigi I	Jl. Caringin RT 001 RW 004	KSM
8	Ciparigi II	Kp. Ciparigi Kaum RT 003 RW 006	KSM
9	Anugrah Tanah Baru	SMKN 2 Kota Bogor Jl. P. Assogiri RT 004 RW 004	KSM
10	Rusunawa II Tanah Baru	Kp. Kramat, Rusunawa Tanah Baru	KSM
11	Taruna Kompos Mulyaharja	Jl. Cibureum Gg. Kabayan RT 002 RW 003	KSM
12	Citra Mandiri Kertamaya	Kp. Margabhakti RT 001 RW 008	KSM
13	Benteng Hijau LawangIntung	Asrama Pusdikzi Kodiklat TNI AD	KSM
14	Waste To Energi Ranggamekar	BNR Blok. L RT 001 RW 010	KSM
15	Bumi Kencana Permai / BKP	Perum Bumi Kencana Permai RT 004 RW 010	KSM
16	Bhakti Warghana	Kp. Nyangkokot RT 02 RW 04	KSM
17	Dharmas / Kencana	Perum Kencana Dharmas RT 05 RW 013	KSM
18	Mutiara Kayumanis I	Kp. Salabenda RT 002 RW 004	KSM
19	Kayumanis II Sumurwangi	Kp. Sumurwangi RT 002 RW 010	KSM
20	Umul Kuro / Cibadak	Jl. Seremped RT 003 RW 004	KSM
21	Kembang Setaman / BCC	Bukit Cimanggu City Blok X	KSM
22	Tulip / Kayumanis III	Kp. Munjul RT 003 RW 006	KSM
23	Taman Sari Persada / Cibadak	Perum. Taman Sari Persada Blok D1 No. 10	KSM
24	Griya Katulampa	Griya Katulampa Blok D1 RW 010	KSM
25	TPS 3R Melati (Warban 5)	Kp. Warban Rt 04 / 05 Kel : Bondongan	KSM
26	TPS 3R Gerbang Mulia Berseri (bojongkerta)	belum aktif	KSM
27	TPS 3R Mekar Mandiri	belum aktif	KSM
28	Sentral Kompos	Kp. Legok Muncang RT 001 RW 015	Aparatur
29	Kantor DLH Paledang Kota Bogor	Kantor DLH Kota Bogor, Jl. Paledang No. 43	Aparatur
30	TPS 3R Bumi Indraprasta	Jalan Pandawa Raya Blok B1 No.21	Aparatur

Sumber : Data DLH Kota Bogor, 2023

## PENGELOLAAN SAMPAH TPS 3R DI KOTA BOGOR

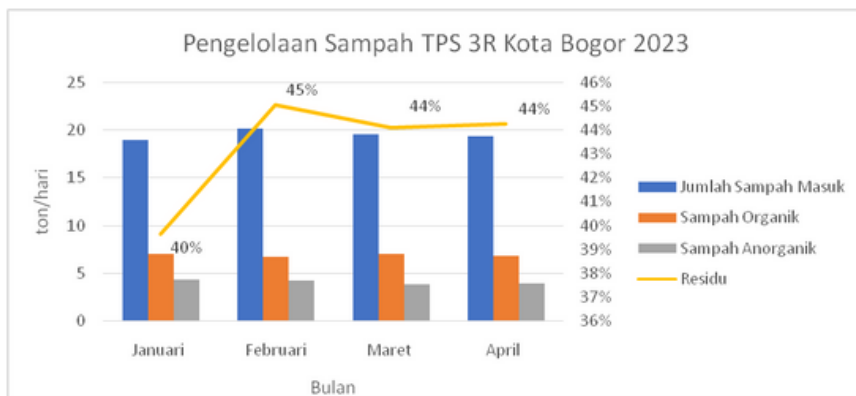
Aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh KSM di TPS 3R dibagi menjadi 2 yaitu pengolahan sampah organik dan pengolahan sampah anorganik.

Pengolahan sampah organik yaitu mengolahnya menjadi bahan baku pakan ternak, kompos dan sumber energi (biodigester). Sedangkan untuk pengolahan sampah anorganik di TPS 3R yaitu memilahnya untuk menjadi bahan baku daur ulang industri dan me-recycle menjadi bahan baku kerajinan (upcycle) (gambar 3)



Gambar 3. Kegiatan Pengelolaan TPS 3R di Kota Bogor  
Sumber : DLH Kota Bogor, 2023

Berdasarkan data Bulan Januari s.d April Tahun 2023 pengelolaan dari seluruh sampah yang masuk ke TPS 3R di Kota Bogor. Sudah berhasil mengurangi jumlah residu yang masuk ke TPA, berkisar  $\pm 40\%$ . Sehingga TPS 3R di seluruh Kota Bogor sudah berhasil melakukan pengelolaan sampah baik organik dan anorganik sebesar  $\pm 60\%$  dari total sampah yang masuk ke TPS 3R (Gambar 3)



Gambar 3. Grafik Pengelolaan Sampah Kota Bogor 2023

Sumber : Data DLH Kota Bogor, 2023

## KESIMPULAN

Pembangunan TPS 3R di Kota Bogor merupakan salah satu metode optimalisasi yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA Galuga dan meningkatkan pengelolaan sampah dari sumber. Bekerja sama baik dengan sektor swasta, sektor pendidikan dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) melalui pendekatan 3R dalam pengelolaan sampah akan membantu mengurangi volume dari timbulan sampah yang masuk ke TPA Galuga, meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dan terbentuknya circle ekonomi di masyarakat. Dengan kerjasama yang baik KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam melakukan pengelolaan dan sosialisasi-edukasi,  $\pm 60\%$  sampah yang masuk ke TPS 3R sudah dapat terkelola dengan baik. Sehingga tersisa residu sebesar  $\pm 40\%$  yang terbuang ke TPA Galuga. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target dan strategi daerah sesuai Peraturan Walikota Bogor No 82 Tahun 2018. Sehingga dalam upaya yang berkelanjutan, Kota Bogor terus berusaha untuk dapat menjadi contoh inspirasi bagi kota-kota lain dalam pengelolaan sampah yang optimal, efektif dan bertanggung jawab.



## SUMBER

Peraturan Daerah Kota Bogor No 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan

Peraturan Walikota No 82 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bogor dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Kota Bogor Dalam Angka 2023  
Laporan Pengelolaan Sampah TPS 3R Bulan Januari s.d April Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Laporan SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) Kota Bogor Tahun 2019

Laporan SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) Kota Bogor Tahun 2020

Laporan SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) Kota Bogor Tahun 2021

Laporan SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) Kota Bogor Tahun 2022

Petunjuk Teknis TPS 3R, Dirjen Cipta Karya Tahun 2021



# MASKOT KOTA BOGOR

DISUSUN OLEH  
LISE LISTIANTI  
DAN  
MUHAMAD NAJMI FAUZAN FIRDAUS



## APA ITU MASKOT?

Maskot adalah simbol atau karakter yang menjadi representasi atau identitas dari suatu organisasi, perusahaan, atau acara. Biasanya berbentuk hewan, manusia, atau objek dengan ciri khas yang mudah diingat dan menarik. Maskot bertujuan untuk membangun ikatan emosional dengan audiens, meningkatkan kesadaran merek, dan menciptakan kesan positif. Penggunaan maskot populer di bidang olahraga, pariwisata, dan pemasaran.

## INSPIRASI MASKOT KOTA BOGOR

Terinspirasi dari Maskot Prefektur Kumamoto Jepang, dimana prefektur Kumamoto ini memiliki Maskot yang dinamakan Kumamon. Dengan penampilannya yang lucu dan ekspresif sebagai beruang hitam, Kumamon menjadi fenomena budaya populer di Jepang dan di seluruh dunia. Kumamon merupakan simbol identitas kota Kumamoto dan telah berperan penting dalam mempromosikan pariwisata dan meningkatkan ekonomi wilayah tersebut. Dalam setahun setelah diluncurkan, jumlah pengunjung ke Kumamoto meningkat lebih dari 141 ribu orang, dan pendapatan dari penjualan berbagai merchandise

Kumamon melampaui 29 miliar yen. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak positif pada ekonomi lokal, tetapi juga memberi dorongan semangat bagi masyarakat Kumamoto yang saat itu sedang pulih dari dampak gempa bumi besar di wilayah tersebut. Kumamon adalah hasil kolaborasi antara pemerintah kota Kumamoto dan Akihiro Suwa, seorang desainer grafis yang menciptakan karakter ini.

Ide di balik Kumamon adalah menciptakan maskot yang dapat merangkul semua orang tanpa batasan usia atau gender, sehingga menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat luas. Kumamon diberikan kepribadian yang ramah, energetik, dan humoris, yang membuatnya mudah didekati dan dicintai oleh semua orang. Pada awalnya, peran Kumamon hanyalah untuk mempromosikan pariwisata dan kekayaan budaya Kumamoto. Namun, karakter ini tumbuh menjadi lebih dari sekadar simbol wisata. Kumamon digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai sosial kepada anak-anak dan sebagai duta kemanusiaan untuk mengumpulkan dana bagi mereka yang membutuhkan. Keberhasilannya sebagai maskot inovatif

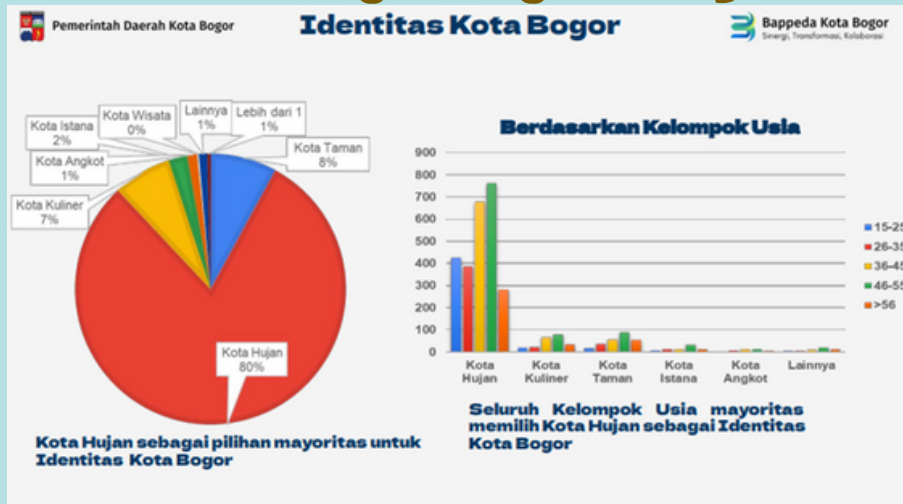
juga menarik perhatian bisnis dan lembaga pemerintah lainnya, yang kemudian mencoba mengadopsi strategi pemasaran yang mirip dengan menggunakan karakter lucu dan menggemaskan untuk menarik perhatian dan menciptakan ikatan emosional dengan pelanggan atau warga. Terinspirasi dari Kumamon, Kota Bogor ingin memiliki Maskot Kota Bogor sebagai salah satu cara untuk memperkuat identitas Kota Bogor, meningkatkan daya tarik pariwisata, dan menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Bogor.

## LAHIRNYA RUBO

Dalam proses penciptaan maskot sebagai representasi identitas Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor melibatkan aspirasi, partisipasi dan peran masyarakat dalam penciptaan maskot ini. Untuk itu tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bogor, mengadakan survei untuk mengetahui, pandangan masyarakat Kota Bogor mengenai keunikan dan kekayaan Kota Bogor. Survei dilaksanakan secara online selama 8 hari dimulai pada tanggal 13 April sampai 20 April 2023. Survei mencakup beberapa poin yang berkaitan dengan Kota Bogor diantaranya identitas Kota Bogor, ciri khas Kota Bogor, warna yang menggambarkan Kota Bogor, sifat yang mencerminkan Kota Bogor, makanan khas Kota Bogor, minuman khas Kota Bogor, dan buah khas Kota Bogor.

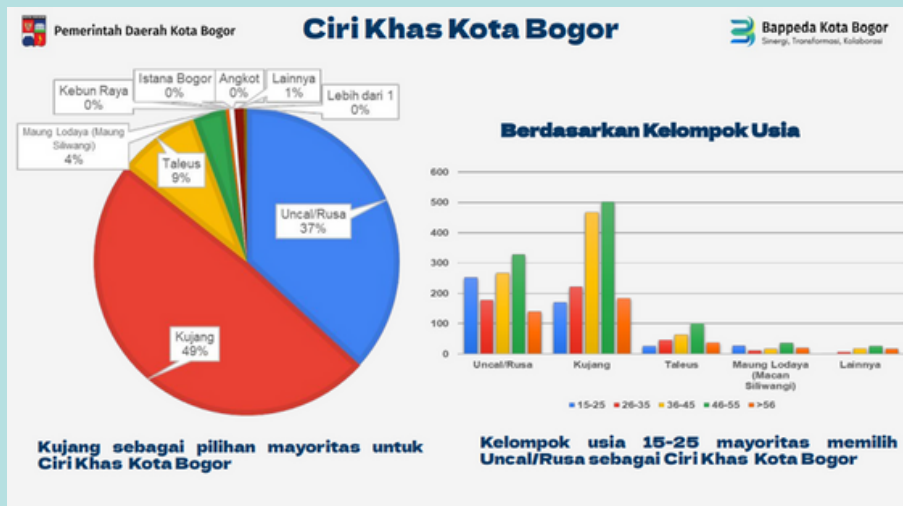
Dari hasil survey terdapat 3.169 responden yang memberikan pandangannya terhadap Kota Bogor, dengan rincian data sebagai berikut.

## 1. Identitas Kota Bogor Sebagai Kota Hujan



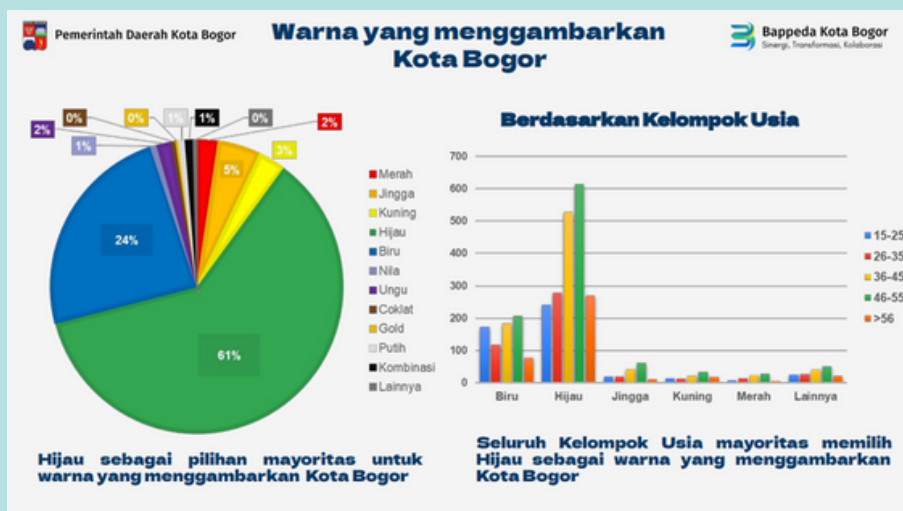
Berdasarkan hasil survei, sebanyak 80% responden menyatakan bahwa Kota Bogor identik dengan Kota hujan.

## 2. Ciri Khas Kota Bogor



Hasil survei menunjukkan pilihan responden yang beragam, bahwa ciri khas Kota Bogor tidak hanya pada satu hal saja. Hampir setengah atau 49% dari responden memilih kujang sebagai ciri khas Kota Bogor, 37% responden memilih uncal/rusa, 9% memilih taleus, 4% memilih maung lodaya/maung siliwangi, dan 1% memilih lainnya. Dari survey tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua ciri khas Kota Bogor yang paling menonjol yaitu kujang dan uncal/rusa.

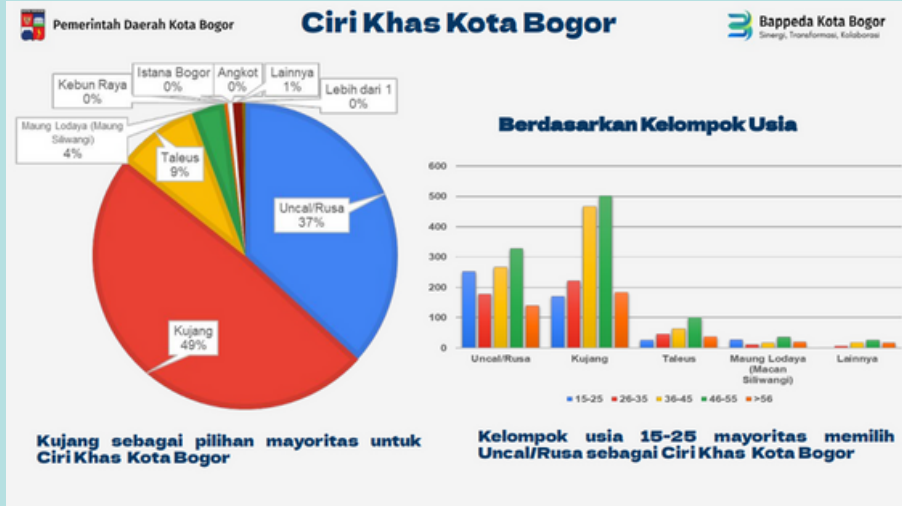
## 3. Warna yang Menggambarkan Kota Bogor



Hasil survei menunjukkan sebanyak 61% responden memilih warna hijau, dimana hal ini dapat dikatakan sebagai warna yang merepresentasikan Kota Bogor. Pilihan warna lainnya sebanyak 24% responden memilih warna biru sebagai warna yang menggambarkan Kota Bogor. Sisanya sebanyak 5% memilih warna jingga, 3% memilih warna kuning, 2% memilih warna merah, 2% memilih warna ungu, 1% memilih warna nila, 1% memilih warna putih dan 1% memilih warna kombinasi.

Berdasarkan hasil survey tersebut maka dipilihlah warna hijau dan biru sebagai warna yang menggambarkan Kota Bogor.

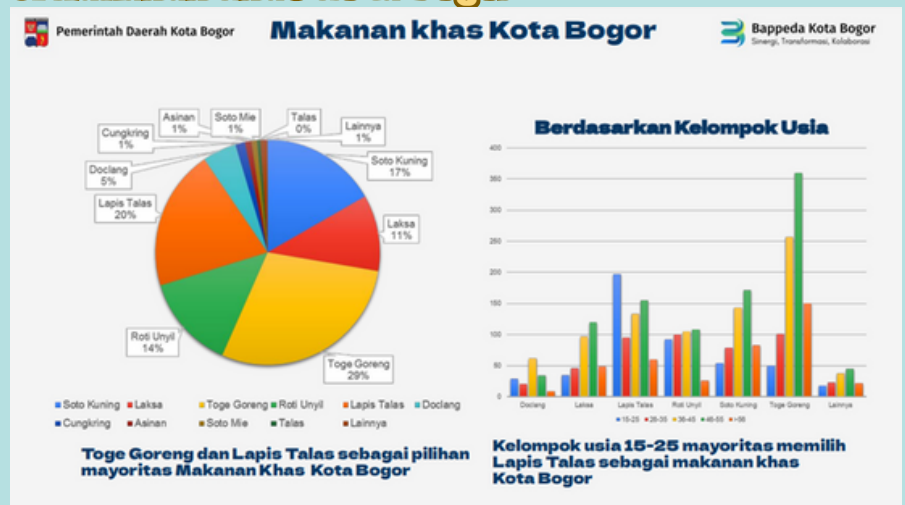
## 4. Sifat Yang Mencerminkan Warga Kota Bogor



Menurut survei, mayoritas responden/70% responden menyatakan bahwa sifat yang mencerminkan warga Kota Bogor adalah someah/ramah. Sifat lain yang dipilih responden adalah 11% memilih sifat toleran, 10% memilih sifat santun, 5% memilih sifat riang, 3% memilih sifat lucu, dan 1% memilih lainnya. Dari hasil survey, maka dipilihlah sifat someah/ramah dan toleran sebagai sifat yang mencerminkan warga Kota Bogor.

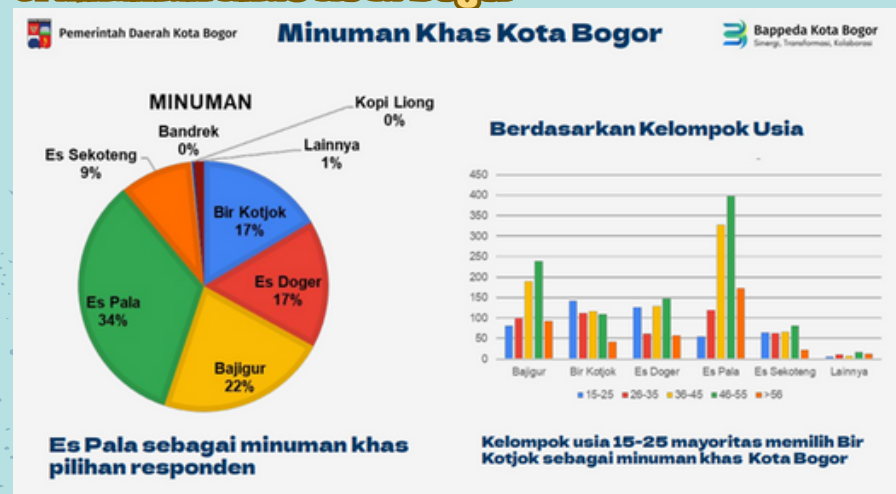
Terkait makanan khas Kota Bogor, hasil dari survey cukup beragam. Toge goreng menempati posisi tertinggi sebagai makanan khas Kota Bogor dengan jumlah responden sebanyak 29%. Disusul oleh lapis talas di posisi kedua dengan jumlah responden sebanyak 20%, kemudian 17% responden memilih soto kuning, 14% responden memilih roti unyil, 11% responden memilih laksa, 5% responden memilih doclang, 1% responden memilih soto mie, 1% responden memilih asinan, 1% responden memilih cungkring, dan 1% responden memilih lainnya. Jika melihat hasil survei berdasarkan kelompok usia,

## 5. Makanan Khas Kota Bogor



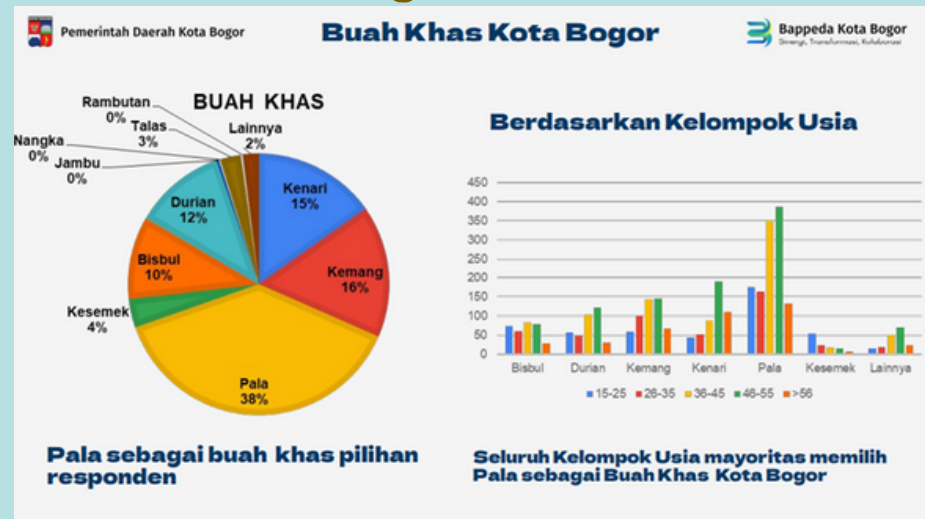
terdapat perbedaan pandangan yang signifikan dimana sebagian besar responden dengan rentang usia 15-25 memilih lapis talas sebagai makanan khas Kota Bogor, sementara responden dengan rentang usia 46-55 memilih toge goreng. Dengan demikian, terdapat dua makanan khas yang paling menonjol yaitu toge goreng dan lapis talas.

## 6. Minuman Khas Kota Bogor



Tidak berbeda makanan khas Kota Bogor, hasil survey terkait minuman khas Kota Bogor juga cukup beragam. Meskipun begitu, es pala menjadi minuman yang paling dominan yang dipilih oleh responden yaitu sebanyak 34%. Disusul oleh bajigur sebanyak 22%, es doger 17%, bir kotjok 17%, es sekoteng 9% dan 1% responden memilih lainnya. Dengan demikian es pala terpilih menjadi minuman khas Kota Bogor.

## 7. Buah Khas Kota Bogor



Berdasarkan hasil survey, buah pala menjadi buah yang paling dipilih sebagai buah khas Kota Bogor dengan jumlah responden sebanyak 38%. Responden lainnya yang memilih buah kemang sebanyak 16%, buah kenari 15%, buah durian 12%, buah bisbul 10%, kesemek 4%, talas 3% dan sisanya sebanyak 2% memilih lainnya. Sehingga buah pala terpilih untuk mewakili buah khas Kota Bogor.

Hasil survei tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam Sayembara Maskot Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kota Bogor dan Reka Bogor – Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor. Sayembara ini dilakukan secara terbuka untuk para desainer kreatif dalam membuat maskot Kota Bogor. Desain Maskot adalah Uncal yang dapat beraksesoris kujang dengan kombinasi warna hijau dan biru. Desain maskot juga bisa menonjolkan karakter someah dan toleran. Referensi khas Kota Bogor lainnya seperti makanan dan minuman dapat digunakan sebagai penguat narasi identitas maskot Kota Bogor.

Sayembara dimulai pada tanggal 28 April hingga 18 Mei 2023 dimana pada 28 April-10 Mei 2023 merupakan waktu pengumuman kompetisi. Penjurian dilakukan pada tanggal 11-14 Mei 2023 dan pengumuman pemenang dilaksanakan pada 18 Mei 2023. Adapun yang menjadi juri dalam sayembara ini ialah Wahyu Kusmawan “BEBE” selaku seniman, Tri Riki Meinal, S.SOS, MM.Par selaku Akademisi, dan Agus Gusnul Yakin selaku Praktisi Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Terdapat 88 peserta yang berpartisipasi dalam Sayembara Maskot Kota Bogor. Setelah hasil penilaian juri dan pemaparan di depan Bapak Wali Kota, diperoleh pemenang sayembara dengan Maskot RuBo karya Mahdi Albart.

## RuBo, Maskotnya Kota Bogor.



RuBo dikenalkan oleh Bapak Wali Kota Bogor, Bima Arya bertepatan dengan Hari Jadi Bogor (HJB) yang ke-541 tahun di Balai Kota Bogor. Wali Kota Bogor menyampaikan RuBo milik semua warga Kota Bogor dan dapat diproduksi oleh seluruh UMKM di Kota Bogor sebagai merchandise.

Terdapat makna dan filosofi pada maskot RuBo dimana ada 5 pemaknaan yang ada pada tubuh RuBo, pemaknaan ini adalah bentuk filosofis yang mencerminkan arti tertentu, hingga nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya, yaitu: Bentuk Tubuh, Tanduk, Bentuk Hati di Dahi, Sembilan Tutul, dan Warna.

Sudut-sudut tubuh yang bulat, membuatnya tidak berbahaya, ramah, bersahabat dan terbuka dengan siapapun. Bentuk tubuh menyerupai manusia memberikan kesan yang lebih hidup, nyata, bernyawa dan interaktif. Juga, kakinya yang jenjang menunjang gerak tubuhnya yang gesit dan lincah untuk dapat mudah bermanuver dengan dinamis. Hal ini bermakna literal dan kiasan:

- Makna literal seraya dengan slogan Bogor Berlari.
- Makna kiasan yang mencerminkan dinamisme Kota Bogor dan warganya yang kontemporer, dapat menyikapi isu kemajuan sosial, budaya, teknologi dan urbanisme.

### 1. Bentuk Tubuh



## 2. Tanduk



Tanduk rusa dimaknai sebagai bentuk pertahanan diri, penarik perhatian dan identitas utama yang dimiliki oleh rusa. Secara pemaknaan, tanduknya dibuat menyerupai Kujang dengan bentuk yang telah melalui proses dekomposisi visual, agar lebih relevan dan memiliki pembaruan dalam pengolahan bentuk Kujang sebagai salah satu senjata/alat pertahanan diri, penarik perhatian dan identitas Kota Bogor.

## 3. Bentuk Hati di Dahi



Terinspirasi dari wajah rusa tutul yang memiliki cekungan dan tanda hitam pada dahinya. Diilustrasikan menjadi tanda cinta yang melambangkan RuBo yang lovable, mudah dikenali, mencintai dan dapat dicintai oleh semuanya.

Melambangkan 9 pintu pada filosofi Tepas Salapan Lawang Dasakreta, yaitu: kedamaian, persahabatan, keindahan, kesatuan, kesantunan, ketertiban, kenyamanan, keramahan, dan keselamatan. Diharapkan kehadiran RuBo ini juga dapat mempertegas dan mengemban semangat dari filosofi tersebut.

## 4. Sembilan Tutul



## 5. Warna



Pemilihan warna yang melambangkan lansekap alam Kota Bogor yang memiliki suasana alam: perbukitan, dataran tinggi, taman, tumbuhan, air dan hujan. Ilustrasi keseimbangan lansekap alam ini membangkitkan romantisme dari keindahan dan harmonisasi lingkungan hidup. Citra warna biru menggambarkan Kota Bogor yang asri, sejuk dan kontemplatif, juga memperkuat persona Kota Bogor sebagai kota hujan.





## Penggunaan RuBo

RuBo dapat di produksi oleh seluruh UMKM di Kota Bogor sebagai merchandise. Walikota Bogor Bapak Bima Arya menyebutkan, kedepan RuBo akan menjadi brand ambassador Kota Bogor dan juga penyemangat dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat Kota Bogor. Jika masyarakat yang ingin mengundang RuBo dipersilahkan bersurat ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, seperti untuk acara istimewa, mengenalkan program-program dinas/OPD dan acara lainnya. RuBo juga memiliki Instagram @si.rubo dan untuk warga Kota Bogor yang akan membuat merchandise RuBo dapat mengakses [bitly/rubomaskotkotabogor](https://bit.ly/rubomaskotkotabogor).

## Sumber

- Kraak, V.I. and Story, M. (2015), Influence of characters on children's diet. *Obes Rev*, 16: 107-126. <https://doi.org/10.1111/obr.12237>
- Sri Giriwati, Novi Sunu & Homma, Riken & Iki, Kazuhisa. (2013). Urban tourism: Designing a tourism space in a city context for social sustainability. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*. 179. 165-176. 10.2495/SCI30141.
- [https://kotabogor.go.id/index.php/show\\_post/detail/102470/keren-kota-bogor-kini-miliki-maskot-rubo](https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/102470/keren-kota-bogor-kini-miliki-maskot-rubo)





## **ALAMAT KORESPONDENSI**

### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor**

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT.01/RW.01, Pabaton,

Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122

### **Kontak**

Telepon: (0251) 8338052

Website:

<http://bappeda.kotabogor.go.id>

Email: [bappeda@kotabogor.go.id](mailto:bappeda@kotabogor.go.id)

Instagram: @bappeda.kotabogor

Twitter: @BappedaBogor

